

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Sehingga, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut tersebut maka daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan transparansi dalam setiap pelaporannya sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui mengenai anggaran dan belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.

Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu cabang ilmu Akuntansi yang memproses mengenai transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Proses transaksi tersebut menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi-informasi keuangan yang bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat dan untuk kepentingan pihak-pihak terkait. Menurut Mardiasmo (2002:4) sektor publik sering dinilai sebagai tempat pemborosan, inefisiensi anggaran, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Sehingga, pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi organisasi karena hal itu berkaitan dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih mengutamakan *Value for Money* dalam menjalankan segala kegiatannya. Menurut Mardiasmo (2002), konsep mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yaitu, memanfaatkan secara ekonomis dan efisien dalam pengadaan alokasi sumber daya. Sehingga, dapat meminimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasilnya. Implementasi prinsip *Value for Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik

. Berdasarkan penelitian Damayanti (2017) tentang Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Konsep Value for Money Pada Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dengan konsep Value for Money pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2016 berdasarkan variabel ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari kriteria ekonomi dapat dikatakan ekonomis karena dari tahun 2013-2016 hasilnya tidak ada yang lebih dari 100%. Sedangkan jika dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang efisien karena dari tahun 2013-2016 hasilnya ada yang lebih dari 100%. Sementara itu untuk rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sangat efektif karena dari tahun 2013-2016 hasilnya lebih dari 100%.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak sumber pendapatan dari berbagai sektor. Di antaranya yaitu, sektor pertanian, perdagangan hingga pariwisata. Selain itu, pendapatan Kabupaten Kediri yang mengalami peningkatan setiap tahunnya membutuhkan pelaporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan. Sedangkan, Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Kota Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Pada tahun 2010, Kota Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia yaitu *Most Recommended City for Investment* berdasarkan survey oleh SWA.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri dan Kota Kediri jika dilihat dari konsep *Value for Money*. Sehingga, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep *Value for Money* Antara Kabupaten dan Kota Kediri Tahun 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Adanya perundang-undangan mengenai otonomi daerah tersebut yang dapat mengatur daerahnya sendiri secara mandiri tidak serta merta membebaskan tanggung jawab daerah terhadap pusat. Karena pembiayaan daerah masih mendapat sumbangan dana dari pusat, maka daerah bertanggung jawab untuk melaporkan dana tersebut dalam bentuk Laporan Realisasi APBD. Disisi lain dengan adanya peraturan tersebut masyarakat juga menuntut suatu adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah, apakah dana yang digunakan sudah memenuhi target yang diharapkan atau belum.

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kediri Berdasarkan Konsep *Value for Money* ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Kediri Berdasarkan Konsep *Value for Money* ?
3. Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri Berdasarkan Konsep *Value for Money* ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka permasalahan yang ada di dalam penelitian ini perlu adanya suatu batasan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Kediri berdasarkan konsep *Value for Money* Tahun 2012-2016.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value for Money* antara Kabupaten dan Kota Kediri Tahun 2012-2016. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan konsep *Value for Money* tahun 2012-2016 ?
- b. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Kediri berdasarkan konsep *Value for Money* tahun 2012-2016?
- c. Mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan pada pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri berdasarkan Konsep *Value for Money* tahun 2012-2016?

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, khususnya daerah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri yang terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan referensi dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dan mampu mengelola belanja daerah untuk meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah secara efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah. Serta penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam pengambilan suatu kebijakan.